

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menunjukkan deskripsi tentang data yang meliputi nilai minimum dan maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi masing-masing variabel yang ada dalam penelitian. Hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskriptif Awal

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas_Audit	2438	.00	1.00	.3843	.48654
Komite_TataKelola	2438	.00	1.00	.0615	.24034
Risiko_Industri	2438	.00	1.00	.2100	.40740
RasioDK_Politik	2438	.000	3.000	.03452	.115250
Diversifikasi	2438	.00	1.00	.2116	.40856
Pengungkapan_Anti_Korupsi	2438	.000	.425	.08136	.082168
Valid N (listwise)	2438				

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah data yang ada dalam penelitian ini sebanyak 2438. Angka tersebut masih merupakan jumlah awal pada saat belum dilakukan uji asumsi klasik normalitas. Setelah dilakukan uji normalitas dan eliminasi data yang bernilai ekstrim (*extreme values*) maka hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Analisis Deskriptif Akhir

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas_Audit	1058	.00	1.00	.3336	.47174
Komite_TataKelola	1058	.00	1.00	.0180	.13286
Risiko_Industri	1058	.00	1.00	.2042	.40328
RasioDK_Politik	1058	.000	.333	.00650	.037193
Diversifikasi	1058	.00	1.00	.2098	.40738
Pengungkapan_Anti_Korupsi	1058	.025	.300	.04938	.041820
Valid N (listwise)	1058				

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah data setelah dilakukan uji normalitas dan eliminasi data yang bernilai ekstrim (*extreme values*) sebanyak 1058. Angka tersebut merupakan jumlah data yang telah berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Dalam penelitian ini variabel Kualitas Audit diproksikan dengan variabel *dummy* yaitu perusahaan diaudit oleh KAP *big 4* atau non *big 4*. Variabel ini memiliki nilai minimum 0 (VIVA tahun 2017) dan maksimum 1 (AALI tahun 2013) serta rata-rata atau mean 0,3336. Artinya perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 33,36% diaudit oleh KAP *big 4*.

Variabel Keberadaan Komite Tata Kelola diproksikan dengan variabel *dummy* yaitu perusahaan memiliki komite tata kelola atau tidak memiliki. Variabel ini memiliki nilai minimum 0 (ERTX tahun 2015) dan maksimum 1 (BDMN tahun 2015) serta rata-rata atau mean 0,0180. Artinya perusahaan

yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 1,8% memiliki komite tata kelola.

Variabel Risiko Industri diproksikan dengan variabel *dummy* yaitu perusahaan termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau tidak termasuk. Variabel ini memiliki nilai minimum 0 (DSNG tahun 2015) dan maksimum 1 (EXCL tahun 2015) serta rata-rata atau mean 0,2042. Artinya perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 20,42% termasuk dalam kategori berisiko tinggi.

Variabel Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik diproksikan dengan rasio antara jumlah anggota dewan komisaris yang berafiliasi politik dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Variabel ini memiliki nilai minimum 0 (AKSI tahun 2013) dan maksimum 0,333 (APLN tahun 2015) serta rata-rata atau mean 0,00650. Artinya perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata rasio dewan komisaris yang berafiliasi politik 0,65%.

Variabel Diversifikasi Perusahaan diproksikan dengan variabel *dummy* yaitu perusahaan memiliki anak perusahaan berbeda segmen atau sama segmen 0 (WEHA tahun 2017) dan maksimum 1 (AALI tahun 2013) serta rata-rata atau mean 0,2098. Artinya perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 20,98% memiliki anak perusahaan sama segmen.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dimiliki berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan SPSS 22:

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Awal

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.171	2438	.000	.885	2438	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* atas *Unstandardized Residual* menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti data belum berdistribusi normal.

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Akhir

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.027	1058	.074	.991	1058	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* atas *Unstandardized Residual* menunjukkan nilai signifikansi $0,074 > 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian pada residual. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS 22:

Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.045	.002		29.162	.000
	Kualitas_Audit	-.002	.002	-.022	-.714	.476
	Komite_TataKelola	.001	.008	.005	.174	.862
	Risiko_Industri	-.002	.003	-.019	-.610	.542
	RasioDK_Politik	.013	.030	.013	.431	.666
	Diversifikasi	-.001	.003	-.009	-.279	.780

a. Dependent Variable: abs_res

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel independen saling berkaitan atau tidak. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas menggunakan SPSS 22:

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kualitas_Audit	.986	1.014
Komite_TataKelola	.983	1.017
Risiko_Industri	.993	1.007
RasioDK_Politik	.996	1.004
Diversifikasi	.998	1.002

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Tabel tersebut menunjukkan nilai *Tolerance* untuk masing-masing variabel independen <1 dan tidak ada nilai VIF variabel independen yang lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan data bebas multikolinearitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS 22:

Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.897 ^a	.805	.804	.018512	1.842

a. Predictors: (Constant), Diversifikasi, Kualitas_Audit, Risiko_Industri, RasioDK_Politik, Komite_TataKelola

b. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Tabel menunjukkan nilai Durbin Watson 1.842 diantara dU (1.5) dan 4 - dU (2.5) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.3. Hasil Analisis Regresi Berganda

4.3.1. Uji Overall Model Fit (Uji F)

Uji ini digunakan untuk menilai model yang dihipotesiskan telah fit atau tidak. Berikut adalah hasil uji model fit dengan SPSS 22:

Tabel 4.8. Hasil Uji Overall Model Fit

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.488	5	.298	868.457	.000 ^b
	Residual	.361	1052	.000		
	Total	1.849	1057			

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

b. Predictors: (Constant), Diversifikasi, Kualitas_Audit, Risiko_Industri, RasioDK_Politik, Komite_TataKelola

Tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti kualitas audit, keberadaan komite tata kelola, risiko industri, anggota komisaris yang berafiliasi politik dan diversifikasi perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi secara simultan dan model yang dihipotesiskan telah fit.

4.3.2. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai koefisien determinasi atau *adjustedR²* menunjukkan seberapa besarnya variabel-variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Berikut adalah hasil koefisien determinasi:

Tabel 4.9. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.805	.804	.018512

a. Predictors: (Constant), Diversifikasi, Kualitas_Audit, Risiko_Industri, RasioDK_Politik, Komite_TataKelola

Tabel menunjukkan *adjusted R²* sebesar 0,804 yang berarti variabel kualitas audit, keberadaan komite tata kelola, risiko industri, anggota komisaris yang berafiliasi politik dan diversifikasi perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi sebesar 80,4%. Sebesar 19,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

4.3.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut adalah hasil dari uji t dengan SPSS 22:

Tabel 4.10. Hasil Uji t

		Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Kesimpulan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.042	.001		51.883	.000	
	Kualitas_Audit	.005	.001	.057	4.182	.000	Diterima
	Komite_TataKelola	.233	.004	.741	53.972	.000	Diterima
	Risiko_Industri	-.009	.001	-.083	-6.110	.000	Diterima
	RasioDK_Politik	.573	.015	.510	37.369	.000	Diterima
	Diversifikasi	-.001	.001	-.013	-.981	.327	Ditolak

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

1. Hipotesis Pertama

Dari hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai B $+0,005$ yang berarti kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Dengan demikian "**H1 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan Anti Korupsi**" diterima.

2. Hipotesis Kedua

Dari hasil uji hipotesis kedua diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai B $+0,233$ yang berarti keberadaan komite tata kelola berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti

korupsi. Dengan demikian “**H2 : Keberadaan Komite Tata Kelolaberpengaruh positif terhadap pengungkapan Anti Korupsi**” diterima.

3. Hipotesis Ketiga

Dari hasil uji hipotesis ketiga diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti risiko industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Dengan demikian “**H3 : Risiko Industri berpengaruh terhadap pengungkapan Anti Korupsi**” diterima.

4. Hipotesis Keempat

Dari hasil uji hipotesis keempat diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menandakan ada pengaruh signifikan, maka hipotesis diterima. Dengan demikian “**H4 : Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik berpengaruh terhadap pengungkapan Anti Korupsi**” diterima.

5. Hipotesis Kelima

Dari hasil uji hipotesis kelima diperoleh nilai signifikansi $0,327 > 0,05$ yang berarti diversifikasi perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Dengan demikian “**H5 : Diversifikasi Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Anti Korupsi**” ditolak.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai signifikansi variabel kualitas audit sebesar 0,000 dan nilai B +0,005. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 dan arah positif maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan dengan jujur tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (DeAngelo 1981). Kualitas audit dapat diukur salah satunya dengan ukuran KAP. Dalam menjalankan pekerjaannya KAP memiliki pedoman dan standar mutu yang harus dipatuhi. KAP *big 4* memiliki standar mutu yang berbeda dibandingkan KAP lain yaitu standar mutu internasional yang digunakan untuk semua afliasinya di berbagai negara. Standar mutu internasional tersebut akan membuat KAP *big 4* menuntut pengungkapan lebih banyak dari perusahaan klien dalam proses audit. Salah satunya adalah mengenai pengungkapan anti korupsi. Maka dari itu perusahaan yan diaudit oleh KAP *big 4* akan lebih banyak mengungkapkan anti korupsi.

Selain itu, KAP *big 4* peduli terhadap anti korupsi dalam konteks KAP *big 4* untuk saat ini sudah lebih jelas dan terbuka menyatakan fokusnya terhadap anti korupsi. Hal ini didukung oleh

pernyataan KAP *big 4* Deloitte bahwa secara khusus, Deloitte telah meningkatkan fokus pada anti-korupsi, membuat pedoman baru untuk penilaian risiko korupsi dan kepatuhan pihak ketiga (<https://www2.deloitte.com>).

Mengutip dari *Anti Corruption Helpdesk* yang diterbitkan oleh Transparency International bahwa sebuah studi pada 2010 menggunakan data dari 57 negara menemukan bukti bahwa kualitas akuntansi dan audit, yang diukur dengan peningkatan kehadiran KAP *big 4* (KPMG, Deloitte, PwC dan EY), secara signifikan terkait dengan tingkat korupsi suatu negara (Malagueno et al. 2010). (<https://knowledgehub.transparency.org>)

Hal tersebut menunjukkan bahwa KAP *big 4* lebih aktif dalam upaya pencegahan korupsi, sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4* lebih terdorong peduli terhadap anti korupsi dan dengan transparan mengungkapkannya dalam pelaporan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipengaruhi oleh KAP *big 4*, Wang et al. (2008) mengemukakan tingkat pengungkapan sukarela untuk perusahaan meningkat jika mereka diaudit oleh KAP *big 4* dan KAP *big 4* yang mendorong pengungkapan yang lebih transparan

dari perusahaan serta Malagueno et al. (2010) menyatakan kualitas informasi akuntansi yang diprosikan oleh peningkatan keberadaan KAP *big 4* memiliki dampak yang signifikan pada tingkat korupsi di suatu negara.

4.4.2. Pengaruh Keberadaan Komite Tata Kelola terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai signifikansi variabel keberadaan komite tata kelola sebesar 0,000 dan nilai B +0,233. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 dan arah positif maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

Komite tata kelola atau *corporate governance committee* merupakan sebuah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi (Wiley, 2010). Tujuan utama komite ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan tata kelola (Charitou et al. 2007).

Terdapat banyak aspek dalam standar pengungkapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan seperti yang tercantum dalam *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*. Salah satunya yaitu pengungkapan anti korupsi. Pengungkapan anti korupsi menandakan bahwa perusahaan peduli akan pemberantasan korupsi yang berbahaya dan merugikan bagi pemerintah, masyarakat dan

perusahaan itu sendiri. Jika terjerat kasus korupsi perusahaan dan merugi baik secara finansial atau secara sosial, kerugian itu dapat membuat perusahaan kehilangan banyak uang maupun kepercayaan konsumen sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan. Tentunya hal tersebut tidak diinginkan perusahaan, oleh sebab itu tata kelola akan dirancang serta diimplementasikan dengan baik demi meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan.

Memastikan pengimplementasian tata kelola perusahaan berlangsung dengan baik merupakan tugas utama komite tata kelola. Tata kelola yang baik salah satunya tercermin dari asas transparansi yang mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditur, dan *stakeholders* lainnya. Seperti yang tercantum dalam laporan tahunan MBSS 2015 tugas Komite GCG yaitu menciptakan dan memelihara sistem yang menjamin penerapan praktek-praktek GCG di MBSS, termasuk penerapan ketat terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kesetaraan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional perusahaan dan anak perusahaannya.

Mengutip tugas komite tata kelola terintegrasi dalam laporan tahunan BDMN 2015 yaitu mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Sebagaimana yang

tertulis di atas, tugas utama komite tata kelola adalah mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi untuk memastikannya berjalan dengan baik. Di dalam tata kelola perusahaan terdapat banyak elemen-elemen salah satunya adalah kode etik yang mengatur tentang korupsi. Pada kode etik BDMN 2015 ada aspek-aspek yang terkait korupsi yaitu pertama mengenai pemberian dan penerimaan hadiah/bingkisan lalu kedua mengenai penyuapan.

Perusahaan yang memiliki komite tata kelola tentu tata kelolanya akan lebih baik dari perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola sehingga diharapkan dapat memberikan informasi lebih transparan kepada para pemegang saham. Salah satunya informasi tentang anti korupsi. Maka dari itu perusahaan yang memiliki komite tata kelola akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir et al. (2014) mengemukakan bahwa *governance committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan LQ 45 dan Malau (2017) menemukan bahwa tata kelola yang diprosikan oleh keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan.

4.4.3. Pengaruh Risiko Industri terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai signifikansi variabel keberadaan komite tata kelola sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, risiko industri berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Paparan perusahaan terhadap korupsi akan ditentukan oleh industri di mana mereka beroperasi. Industri berisiko tinggi yaitu minyak dan gas, kehutanan, pertambangan, pertahanan, konstruksi, telekomunikasi. Juga industri yang bernegosiasi dengan pemerintah atau menjual produk dan layanan kepada pemerintah dianggap berisiko tinggi (Healy & Serafeim, 2013).

Perusahaan yang berurusan dengan pemerintah dianggap berisiko tinggi karena dalam pemerintahan semua dilakukan dengan proses birokrasi. Birokrasi tersebut seringkali rumit dan memakan waktu yang lama sehingga menimbulkan biaya tinggi. Untuk menghindari biaya tinggi karena proses birokrasi yang rumit dan lama maka perusahaan mengambil jalan pintas yaitu dengan meyuap agar proses tersebut dimudahkan dan dipersingkat waktunya.

Industri-industri tersebut memiliki karakteristik yang serupa yaitu memerlukan biaya operasional yang tinggi karena harga pokok dari produk yang mereka jual memang tinggi. Biaya operasional diperoleh dari berbagai sumber misalnya pendanaan dari dalam

perusahaan dan utang. Hal ini berbeda dengan perusahaan keuangan atau jasa yang termasuk berisiko rendah dimana mereka tidak membutuhkan biaya operasional terlalu tinggi untuk kelangsungan operasionalisasinya.

Risiko bisnis ini berkaitan dengan ketidakpastian dalam pendapatan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang menghadapi risiko bisnis tinggi sebagai akibat dari kegiatan operasinya, akan menghindari untuk menggunakan utang yang tinggi dalam mendanai aktivitya karena akan muncul beban biaya atas pinjaman yang dilakukan perusahaan. Hal ini akan memunculkan beban biaya atas pinjaman yang dilakukan perusahaan (Prathiwi & Yadnya, 2017).

Jika berada dalam industri berisiko tinggi maka perusahaan akan lebih mempedulikan tindakan pencegahan korupsi karena tidak ingin perusahaannya tersandung masalah akibat korupsi. Salah satu bukti bahwa perusahaan berusaha mencegah korupsi ditunjukkan dari pengungkapan anti korupsi. Maka dari itu perusahaan yang berada di dalam industri berisiko tinggi akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan anti korupsi.

Argumen lain mengemukakan bahwa apabila perusahaan termasuk dalam risiko tinggi maka semakin rentan dan risiko terjadinya korupsi semakin besar. Jika banyak praktik korupsi terjadi di dalamnya maka perusahaan semakin tidak ingin mengungkapkan karena tidak ingin kasus korupsi tersebut terungkap ke publik. Kedua

argumen diatas sama kuatnya sehingga variabel ini tidak memiliki arah. Maka dapat disimpulkan bahwa, risiko industri berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehde Melo (2015) menemukan hubungan antara risiko industri dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan, Healy & Serafeim (2013) menyatakan bahwa pengungkapan anti korupsi perusahaan dipegaruhi oleh Risiko Industri serta Young & Marais (2012) mengutarakan bahwa semakin perusahaan berada dalam industri berisiko tinggi, semakin banyak mereka melaporkan informasi tentang CSR secara keseluruhan.

4.4.4. Pengaruh Anggota Komisaris yang berafiliasi Politik terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai signifikansi variabel keberadaan komite tata kelola sebesar 0. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggota komisaris yang berafiliasi politik berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Tabel 4.11. Perbandingan antata Perusahaan yang memiliki anggota Politisi aktif dan tidak aktif

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Aktif	277	83,9	83,9	83,9
Tidak aktif	53	16,1	16,1	100,0
Total	330	100,0	100,0	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki anggota komisaris politisi yang aktif hingga tahun penelitian yaitu sebanyak 277 perusahaan atau 83,9%, sedangkan perusahaan yang memiliki anggota komisaris politisi tidak aktif hingga tahun penelitian hanya sebanyak 53 perusahaan atau 16,1%.

Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Anggota komisaris yang berafiliasi politik adalah anggota dewan komisaris yang bergiat di bidang politik.

Pada umumnya politisi memiliki jejaring yang luas serta ikatan dengan lembaga pemerintah, kelompok masyarakat dan organisasi nirlaba. Jejaring mewakili peningkatan pengetahuan dan mereka adalah sumber pertimbangan, keahlian, dan koneksi yang meningkatkan hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya (de Melo, 2015).

Dengan luasnya jejaring dan pengetahuan yang dimiliki oleh politisi maka tentu akan sangat menyadari bahaya korupsi dan kerugiannya pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Selain itu politisi akan sangat peduli terhadap citra atau *image*-nya di masyarakat dan apabila perusahaan terkena kasus korupsi akan

sangat menghancurkan citra tersebut, dapat menurunkan elektabilitas dan berakibat pada rusaknya karir politik. Tentu hal tersebut tidak diinginkan, oleh karena itu mereka akan berusaha mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap anti korupsi dan mengungkapkannya di laporan tahunan.

Diantara *image* politisi yang sebagian besar negatif, masih ada teladan politisi baik yang dapat menjadi contoh bagi politisi-politisi lain. Beliau adalah presiden ke-40 Uruguay Jose Mujica. Ia tidak menggunakan politik sebagai alat untuk berbuat korupsi demi mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Sehingga ia dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Sebagian gajinya pun ia sumbangkan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua politisi memiliki sifat yang buruk namun ada juga politisi yang berbudi dan menjunjung nilai-nilai kebenaran (<https://www.liputan6.com>).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh de Melo (2015) menemukan hubungan antara anggota komisariss yang berpengaruh di masyarakat (politisi, akademisi) dengan pengungkapan anti korupsi perusahaan.

4.4.5. Pengaruh Keberadaan Komite Tata Kelola terhadap pengungkapan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai signifikansi variabel keberadaan komite tata kelola sebesar 0,327. Karena nilai

signifikansi diatas 0,05 maka hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, diversifikasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Diversifikasi diartikan sebagai perusahaan yang mengembangkan bisnis utamanya ke bisnis lainnya (Gluck, 1985). Atau dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki beberapa segmen bisnis berbeda.

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan yang segmennya berbeda dari induk perusahaan memiliki sifat yang kompleks. Sifat kompleks dari perusahaan multi-segmen menyiratkan potensi yang lebih besar untuk asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham (Bens & Monahan, 2004).

Pada perusahaan yang memiliki beberapa segmen bisnis tentunya risiko terjadinya asimetri atau perbedaan informasi juga semakin besar. Dengan menerapkan pengungkapan strategi anti korupsi yang diharapkan bahwa risiko asimetri informasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara manajemen dan pemegang saham dapat dikurangi. Maka dari itu diversifikasi dapat mendorong perusahaan melakukan pengungkapan anti korupsi.

Terdapat argumen lain yang mengemukakan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki beberapa segmen berbeda maka akan semakin rentan terjadi korupsi di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan operasional perusahaan yang semakin rumit dan kompleks. Apabila

operasional rumit dan kompleks risiko terjadinya korupsi semakin besar. Maka dari itu perusahaan semakin tidak ingin mengungkapkan karena tidak ingin kasus korupsi di dalamnya diketahui publik.

Alasan ditolaknyanya hipotesis ini karena pengukuran yang digunakan mungkin kurang tepat menggambarkan variabel diversifikasi. Skor 1 pada variabel *dummy* hanya menandakan bahwa perusahaan terdiversifikasi (kompleks) tetapi tidak menunjukkan tingkatan kompleksitas perusahaan. Selain itu, dalam menentukan apakah anak perusahaan memiliki segmen yang sama atau berbeda dengan induk membutuhkan banyak penilaian atau *judgement* dari peneliti. Semakin banyak *judgement* yang dilibatkan maka akan semakin rentan terjadi kesalahan. Sehingga variabel diversifikasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

